

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (undang-undang otonomi daerah 1999). Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintah negara di maksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kunci pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif adalah perencanaan, koordinasi, dan keterpaduan antar sektor. Pembangunan sektor tersebut di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Tujuan pembangunan dalam kebijakan pembangunan daerah adalah untuk menyeraskan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemajuan

antar daerah, melalui pembangunan serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah.

Secara makro pertumbuhan atau kenaikan PDRB dari tahun ketahun merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah, dimana dalam hal ini PDRB dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi yaitu:

1. sektor Pertanian
2. sektor Pertambangan dan penggalian
3. sektor Industri Pengolahan
4. sektor Listrik, Gas, dan Air bersih
5. sektor Pembangunan
6. sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran
7. sektor Angkutan dan Komunikasi
8. sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
9. sektor jasa-jasa

Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi tersebut diatas. Besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan serta pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel I berikut:

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993
Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 1997 – 2000
(Jutaan Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	1997	1998	1999	2000
1	Cilacap	2.164.332,10	2.051.655,01	2.096.569,60	2.206.677,43
2	Banyumas	1.055.339,40	983.564,12	988.804,68	1.028.604,67
3	Purbalingga	621.733,80	588.640,26	595.126,84	611.664,77
4	Banjarnegara	876.178,89	839.747,97	843.682,85	866.034,16
5	Kebumen	994.820,97	865.213,30	892.635,02	930.822,49
6	Purworejo	697.255,58	652.005,26	668.176,79	684.306,71
7	Wonosobo	570.309,65	484.102,50	491.468,15	513.121,93
8	Magelang	1.035.324,07	1.002.789,27	1.019.215,60	1.054.929,26
9	Boyolali	965.959,65	874.133,43	884.481,69	892.046,22
10	Klaten	1.295.057,63	1.148.045,58	1.153.627,74	1.199.551,88
11	Sukoharjo	1.195.897,01	1.061.616,80	1.074.923,61	1.112.790,61
12	Wonogiri	778.762,78	742.361,47	756.802,53	785.059,86
13	Karanganyar	1.256.500,06	1.109.425,03	1.141.544,82	1.193.085,08
14	Sragen	731.510,56	664.414,00	677.594,04	696.930,14
15	Grobogan	770.949,72	697.230,89	674.329,35	749.529,21
16	Blora	690.746,93	653.529,40	660.453,33	676.637,68
17	Rembang	517.971,25	466.648,91	480.222,34	504.132,77
18	Pati	961.872,65	923.174,19	937.480,81	940.874,70
19	Kudus	3.408.438,73	3.006.674,93	3.030.322,68	3.087.617,87
20	Jepara	939.091,14	939.352,15	945.638,80	989.279,74
21	Demak	790.037,43	706.938,94	723.427,58	744.316,44
22	Semarang	1.198.451,05	985.228,37	999.629,79	1.047.365,80
23	Temanggung	737.658,22	659.706,26	674.562,25	697.991,69
24	Kendal	1.640.379,25	1.487.828,82	1.517.442,71	1.550.396,93
25	Batang	769.665,54	691.365,49	707.438,02	721.649,41
26	Pekalongan	889.637,63	812.568,88	842.326,27	862.264,91
27	Pemalang	1.050.820,79	1.033.694,11	1.050.130,47	1.089.043,63
28	Tegal	931.749,07	847.663,63	869.114,69	911.597,09
29	Brebes	1.236.706,79	1.264.853,81	1.320.755,76	1.381.023,44
	Kota				
30	Magelang	318.094,92	294.902,08	306.308,29	317.300,62
31	Surakarta	1.432.582,37	1.233.018,44	1.250.807,41	1.302.715,92
32	Salatiga	244.998,97	241.288,25	245.601,15	254.362,19
33	Semarang	5.793.806,96	4.737.995,92	4.899.241,89	5.142.532,90
34	Pekalongan	437.613,99	402.045,65	417.953,57	434.639,68
35	Tegal	350.686,48	334.431,35	341.508,56	359.940,91

Sumber: BPS Jawa Tengah, Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 1997 – 2000

Tabel I agaknya dapat memberi gambaran keberhasilan tiap daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam melaksanakan strategi perencanaan pembangunan daerah masing-masing terlihat pada pertumbuhan PDRB. Ketimpangan pertumbuhan PDRB menunjukkan bahwa dibutuhkan perencanaan pembangunan yang matang untuk menyongsong otonomi daerah. Daerah dituntut secara aktif untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuannya sendiri tanpa tergantung dari pemerintah pusat.

Jika pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten atau kota di Jawa Tengah dapat ditingkatkan, hal tersebut tentunya sangat mendukung adanya peningkatan PDRB Propinsi Jawa Tengah, berikut ini pada tabel II dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah, yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB tiap tahun kecuali untuk tahun 1998, dimana hal ini disebabkan oleh adanya krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia. Pada tahun 1999 dan 2000 bangsa Indonesia masih mengalami krisis, tetapi sudah mulai menyesuaikan tahun 1998 (mengalami kenaikan lagi).

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah
Atas Dasar Harga Konstan 1983 Dan 1993
Tahun 1992 – 2000
(Jutaan Rupiah)

No.	Tahun	Total PDRB
1	1992	13969999,53
2	1993	33978959,16
3	1994	36345174,48
4	1995	39013952,94
5	1996	41292375,96
6	1997	42469892,90
7	1998	39345591,32
8	1999	40214745,45
9	2000	41975900,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Berbagai Terbitan

Keterangan :

Tahun 1992–1993, berdasar harga konstan 1983

Tahun 1994–2000, berdasar harga konstan 1993

Dari tabel di atas harus dilihat kembali untuk menginstropeksi perencanaan dan strategi pembangunan masing-masing, sekaligus agar mengevaluasi setiap pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat mengetahui sektor-sektor kegiatan ekonomi yang dapat diprioritaskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Masalah utama didalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah kurang mempunya pemerintah daerah melaksanakan strategi perencanaan yang matang serta kurang jelinya pemerintah daerah dalam

melihat pergeseran-pergeseran yang terjadi dari tahun ketahun dalam sektor ekonomi. Di sinilah peran Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) cukup dominan dalam menentukan arah serta rencana pembangunan di daerah agar pembangunan di daerah berjalan sesuai prioritas sektor yang diinginkan. Tujuan akhir dari pembangunan adalah naiknya pertumbuhan ekonomi melalui naiknya PDRB yang berarti pula akan menaikkan kesejahteraan atau kemakmuran.

Dari latar belakang yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang ANALISIS PERGESERAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI KOTA SURAKARTA yang terjadi dari tahun 1992 – 2000.



1.2 Perumusan masalah

Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendayagunaan potensi yang dimiliki daerah secara optimal. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana pergeseran sektor ekonomi Kota Surakarta yang terjadi tahun 1992 – 2000 ?.
2. bagaimana pertumbuhan sektor ekonomi Kota Surakarta tahun 1992 – 2000 dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah berdasarkan analisis *Shif - Share (S-S)* ?.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui pergeseran pangsa setiap sektor ekonomi dengan menggunakan analisis *Shift-Share*
2. untuk mengetahui komponen-komponen yang berpengaruh pada perekonomian kota Surakarta.

1.4 Manfaat penelitian

1. bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi tambahan informasi sekaligus bahwa evaluasi agar lebih memantapkan peran perencanaan daerah ditahun-tahun mendatang.

2. sebagai bahan informasi bagi penelitian lain yang berniat pada masalah perencanaan daerah.
3. bagi penulis penelitian ini merupakan hasil aplikasi serta penerapan langsung dari salah satu alat analisis yang didapat dari bangku kuliah.

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Jenis dan Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber hasil penelitian yang telah ada serta laporan-laporan dari instansi tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Sumber Data Sekunder adalah .

- a. Jawa Tengah dalam Angka, BPS tahun 1997-1999
- b. Surakarta dalam Angka, BPS tahun 1997-1999
- c. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah
- d. Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Daerah Kota Surakarta.

1.5.2 Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan dua metode analisis, yaitu :

1. analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang tidak menggunakan rumus, tetapi sifatnya berupa penjelasan dan keterangan-keterangan pelengkap.

2. analisis Kuantitatif, yaitu suatu metode yang menggunakan rumus-rumus yang tersedia yang sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti

Penelitian ini menggunakan teknik analisis perencanaan pembangunan yaitu *Shift-Share (S-S)*. Teknik analisis *Shift-Share* adalah suatu teknik analisis didalam perencanaan pembangunan yang menganalisa bagaimana pangsa pasar masing-masing sektor dalam perekonomian daerah yang lebih rendah hirarkis tumbuh dari tahun ketahun terhadap perekonomian daerah yang lebih tinggi secara hirarkis.

Pergeseran (*shift*) sektor-sektor perekonomian daerah dan pertumbuhan ekonominya dapat dilihat dengan membandingkan laju pertumbuhan sektor ekonomi daerah dengan daerah yang secara hirarkis lebih tinggi. teknik *Shift-Share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah yaitu pendapatan atau output sektor-sektor ekonomi daerah selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh pertumbuhan propinsi (N). Pengaruh pertumbuhan propinsi disebut pengaruh pangsa (*Share*), bauran industri (M), pengaruh bauran industri disebut bauran komposisi (*proposional shift*) dan keunggulan kompetitif (C), pengaruh keunggulan kompetitif disebut *regional share*, karena itulah teknik analisis ini dinamakan teknik analisis Shift-Share. Menurut Prasetyo Soepono (1993) bentuk umum persamaan dari analisis *Shift-Share* dan komponen-komponen adalah sebagai berikut:

$$D_{ij} = N_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan:

i = Sektor-sektor ekonomi yang diteliti

j = Variabel ekonomi yang diteliti

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan atau nilai sektor yang dinotasikan sebagai (y)

$$D_{ij} = y \cdot i_j - y_{ij}$$

$$N_{ij} = y_{ij} \cdot r_n$$

$$M_{ij} = y_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Dimana r_{ij} , r_{in} , dan r_n mewakili laju pertumbuhan daerah tingkat II dan daerah tingkat I yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

$$r_{ij} = \frac{(y \cdot i_j - y_{ij})}{y_{ij}}$$

$$r_{in} = \frac{(y \cdot i_n - y_{in})}{y_{in}}$$

$$r_n = \frac{(y_n - y_n)}{y_n}$$

Secara keseluruhan wilayah, persamaan untuk sektor I di wilayah adalah:

$$D = y_{ij} \cdot r_n + y_{ij} (r_{in} - r_n) + y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan :

D = Variabel wilayah

N = Pertumbuhan propinsi

M = bauran industri (industri mix)

C = Keunggulan kompetitif (regional Share)

y_{ij} = Pendapatan sektor i di wilayah j (kabupaten)

y_{in} = Pendapatan sektor i di wilayah n (propinsi)

y^* = Pendapatan tahun akhir

r_{ij} = Laju pertumbuhan sektor i di wilayah j (kabupaten)

r_{in} = Laju pertumbuhan sektor i di wilayah n (propinsi)

r_n = Laju pertumbuhan PDRB di wilayah n (propinsi)

